



Rekonsiliasi Politik Pasca Pilpres 2019: Menumbuhkan Semangat Kebangsaan dalam Konstruksi Sosial Budaya

Jerry Indrawan^{1*}, Anwar Ilmar¹; Ardli Johan Kusuma¹

¹ Jurusan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 12450, Jakarta-Indonesia

Info Artikel

Dikirim: Mei 30, 2022

Diterima: Jul 17, 2022

Dipublikasi: Jul 31, 2022

Kata Kunci:

Konstruksi Sosial Budaya;
Pemilihan Presiden;
Rekonsiliasi Politik;
Semangat Kebangsaan;

Koresponden:

Jerry Indrawan

Jurusan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan
Veteran Jakarta

Email:

jerry.indrawan@upnvj.ac.id

Sitasi Cantuman:

Indrawan, J., Ilmar, A.,
Kusuma, A. J. K. (2022).
Rekonsiliasi Politik Pasca
Pilpres 2019: Menumbuhkan
Semangat Kebangsaan dalam
Konstruksi Sosial. *Journal of
Political Issues*. 4(1); 50-61.
<https://doi.org/10.33019/jpi.v4i1.78>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v4i1.78>

Lisensi:



Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
(CC-BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract The political contestation in the 2019 election has had a surprising impact. Regardless of who wins, this nation seems to be divided into two camps, namely Jokowi camp (01) and Prabowo camp (02). Political, social and cultural polarization occurs from the elite level to the community. The potential for national disintegration or disintegration can emerge and become a threat to the establishment of our beloved Unitary Republic of Indonesia (NKRI) if there is no real effort to improve it. For this reason, a real effort is needed to solve this problem. national reconciliation to reunite the people of the nation who are separated from their national cords. Reconciliation that occurs must be comprehensive so that it has a positive impact on all levels, both elites and communities, and is carried out simultaneously in a top-down, as well as bottom-up manner. Then, reconciliation after the presidential election must also foster a spirit of nationalism in the socio-cultural construction so that after the reconciliation of each element of the nation will automatically unite to achieve national goals and ideals. Responding to the condition of the nation, this paper wants to discuss how political reconciliation should be carried out to reunite the conflicting parties after the 2019 presidential election. This reconciliation must ultimately be able to foster a spirit of nationalism in socio-cultural construction.

Abstrak Kontestasi politik pada Pemilu 2019 lalu memiliki dampak yang cukup mengejutkan. Terlepas dari siapa yang menang, bangsa ini terkesan terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu Jokowi (01) dan kubu Prabowo (02). Polarisasi politik, sosial, dan budaya terjadi pada level elit hingga masyarakat. Potensi perpecahan atau disintegrasi bangsa bisa saja muncul dan menjadi ancaman bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai ini jika tidak ada upaya nyata untuk memperbaikinya. Untuk itu, diperlukan sebuah upaya nyata untuk menyelesaikan masalah ini. rekonsiliasi nasional untuk menyatukan kembali insan-insan bangsa yang terlepas tali kebangsaannya. Rekonsiliasi yang terjadi harus bersifat menyeluruh sehingga berdampak positif ke semua lapisan, baik elit, maupun masyarakat, dan dilakukan bersamaan secara top-down, maupun bottom-up. Kemudian, rekonsiliasi pasca Pilpres ini juga harus menumbuhkan semangat kebangsaan dalam konstruksi sosial budaya agar pasca rekonsiliasi setiap elemen bangsa secara otomatis akan bersatu padu untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Menyikapi kondisi bangsa yang demikian, tulisan ini ingin membahas tentang bagaimana rekonsiliasi politik sebaiknya dilakukan untuk mempersatukan kembali pihak-pihak yang bertikai pasca Pilpres 2019. Rekonsiliasi yang dilakukan ini pada akhirnya harus dapat menumbuhkan semangat kebangsaan dalam konstruksi sosial budaya.

Tentang:

Jerry Indrawan menyelesaikan Studi Magister di Universitas Pertahanan pada Tahun 2014. Saat ini penulis adalah dosen di Jurusan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Anwar Ilmar menyelesaikan Studi Magister di Jurusan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2016. Saat ini penulis adalah dosen di Jurusan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ardli Johan Kusuma menyelesaikan Studi Doktor di Jurusan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2020. Saat ini penulis adalah dosen di Jurusan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

PENDAHULUAN

Kemenangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2019 lalu menyisakan kekhawatiran yang mendalam bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang baru seumur jagung ini. Peristiwa kerusuhan yang sempat melanda ibukota pasca putusan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi tantangan bagi kehidupan berdemokrasi di negeri ini yang sudah berjalan kurang lebih dua dekade. Akibatnya, terjadi polarisasi politik, sosial, dan budaya terjadi pada level elit hingga masyarakat.

Polarisasi sosial dan budaya adalah potensi perpecahan yang muncul karena kuatnya perbedaan politik pasca Pilpres lalu. Kontestasi tajam antara pendukung Jokowi dan Prabowo yang terjadi di semua lini membuat persaingan ini tidak hanya terjadi di ranah politik. Bidang sosial dan budaya juga merasakan dampak dari perseteruan ini. Hal ini bisa dilihat dari panasnya situasi dan kondisi masyarakat Indonesia saat itu. Menurut penulis, ranah ini adalah ranah sosial dan budaya, bukan hanya politik, karena aktornya adalah masyarakat, bukan hanya politisi. Jika dibiarkan, potensi perpecahan atau disintegrasi bangsa bisa saja muncul dan mengancam negara ini.

Dua dekade bukanlah tanda bahwa demokrasi kita sudah berjalan efektif, di mana demokrasi substansial menjadi prioritas. Namun, dua puluh empat tahun demokrasi kita, terutama pasca Pilpres 2019 kemarin, menyadarkan kita bahwa implementasi demokrasi di Indonesia masih rapuh (*fragile*). Demokrasi yang terjadi baru sebatas prosedural, yaitu bahwa kita mampu melaksanakan prosesnya dengan baik, seperti pemilu atau pilkada berjalan rutin lima tahun sekali. Perangkat-perangkat demokrasi yang tersedia, seperti adanya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, juga menandakan demokrasi prosedural.

Penulis merasa bangsa ini mampu dengan baik menyelenggarakan pesta rakyat ini dengan sangat luar biasa baiknya. Sejak 1999, pelaksanaan pemilu berjalan relatif tanpa hambatan berarti. Ditambah dengan pilkada, yang juga menggunakan sistem demokrasi langsung, praktis prosedur menjalankan pemilihan umum sudah dapat dilakukan dengan optimal. Semua perangkat yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan sebuah pemilihan politik berskala besar sudah disiapkan, mulai dari kesiapan aturan, penyelenggaraan, sampai pada pesertanya.

Namun, ada yang kurang dalam pelaksanaan pemilu macam itu. Demokrasi tidak hanya soal prosedural belaka. Pemilu bukan hanya sekedar dilakukan, seperti rakyat mencoblos dan wakil rakyat dicoblos. Demokrasi harus dilakukan secara substansial, yaitu dengan menerima hasilnya dengan baik. Demokrasi tidak diukur dari seberapa bagus instrumen yang disiapkan, namun dari seberapa bagus peserta yang ambil bagian untuk menyikapi hasilnya.

Jangan melihat demokrasi sebagai sebuah hal yang tangible, namun intangible. Kaum demokrat menempatkan kepentingan pribadinya di bawah kepentingan negara dan bangsa. Bukankah demokrasi pertama kali muncul karena kelaliman dari penguasa otoriter yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Demokrasi menjadi anti-tesis dari egoisme. Demokrasi adalah sintesis yang berpihak pada apa yang terbaik bagi kepentingan orang banyak.

Demokrasi adalah alat. Alat untuk membawa sebuah bangsa menuju kesejahteraan. Jika demokrasi saja hanyalah alat, apalagi pemilu. Ekses dari pemilu adalah kesejahteraan bangsa dan negara, bukan konflik horisontal. Pemilu hanya kendaraan yang mengantar sang pemimpin terpilih untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang nantinya akan membawa kaum yang dipimpinnya sesuai dengan cita-cita luhur bangsa tersebut ketika awal berdiri.

Setiap negara pasti bercita-cita untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat di dalamnya. Tidak ada yang ingin sebaliknya. Bahkan, konflik dan perang muncul diakibatkan semua pihak sama-sama ingin membawa kesejahteraan pada bangsanya, hanya caranya saja yang berbeda. Begitu pula di Indonesia. Tidak ada niatan, semakin-yakinnya penulis, dari

Jokowi maupun Prabowo untuk menghancurkan bangsa ini hanya agar dapat dipilih sebagai pemimpin negara. Jika hancur, negara apa yang mau dipimpin? Percuma menjadi presiden jika masyarakat yang dipimpinnya berkelahi sendiri, sehingga negara pecah.

Di Barat, konsep tentang rekonsiliasi yang menekankan akan pentingnya meningkatkan hubungan sosial diantara masyarakat ternyata sangat terbatas dan kontekstual. Sebuah kasus di Angola menunjukkan bahwa rekonsiliasi adalah sebuah konstruksi sosial, di mana pembentukannya dilakukan melalui konsepsi-konsepsi lokal. Bagi banyak masyarakat pedesaan di Angola, konsepsi sosial dan spiritual terhubung sangat erat, apalagi segi spiritualnya. Di sana, upaya rekonsiliasi sangat mengedepankan pendekatan yang sifatnya spiritual, karena itu penting bagi kita untuk mengetahui konsepsi dan makna-makna lokal Angola ([Wessells, 2009](#)).

Salah satu parameter yang menjelaskan soal konflik dan polarisasi bisa diamati dari terbagi duanya masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang bertentangan. Salah satu contohnya adalah bentrok antara gerakan #2019GantiPresiden dengan Gerakan yang menggunakan T-shirt #DiaSibukKerja di lokasi Car Free Day, Jakarta, tahun 2019 lalu. Sebuah polarisasi yang hanya terjadi di media sosial pada awalnya, akan tetapi berkembang dan merembet ke dunia nyata, diikuti dengan gesekan-gesekan langsung secara fisik. Kejadian ini mengingatkan kita pada peristiwa serupa yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 silam, hanya saja kali ini resonansinya lebih kencang karena tingkatnya sudah mencapai pemilu presiden ([Ri'fan, 2018](#)).

Berangkat dari realita itulah tulisan ini ingin mengangkat masalah rekonsiliasi. Bukan rekonsiliasi dalam skala besar, seperti halnya konflik bersenjata atau bahkan perang, namun rekonsiliasi politik antar kubu yang selama ini mendukung pasangan calon (paslon) 01 Jokowi dan 02 Prabowo. Penulis ingin bicara bagaimana rekonsiliasi politik harusnya dilakukan untuk merajut kembali benang ke-bhineka-an yang sempat terputus saat kontestasi digelar tahun 2019 lalu. Setelah itu, pasca rekonsiliasi dibutuhkan semangat baru dalam memandang kebangsaan kita. Hal tersebut dapat dilakukan melalui konstruksi sosial budaya.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis dengan pengumpulan data dilakukan secara studi pustaka. Metode penelitian kualitatif deskriptif juga bisa dilakukan untuk memberi deskripsi fenomena yang ada, baik alami maupun buatan manusia. Fenomena tersebut berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya ([Sukmadinata, 2006](#)). Fenomena yang penulis teliti adalah konstruksi sosial budaya, khususnya pasca konflik yang terjadi saat Pilpres 2019. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian untuk memecahkan masalah yang akan diteliti dengan melakukan penggambaran subjek dan objek yang akan diteliti tersebut. Subjek dan objek tersebut bisa dalam bentuk lembaga, komunitas, individu, dan lain-lain. Analisis yang dilakukan harus sesuai dengan kenyataan di lapangan, dalam arti faktual dan sesuai realita ([Nawawi, 1997](#)).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rekonsiliasi Politik pasca Pilpres 2019

Sejak Jokowi dan Prabowo sudah digadang-gadang akan menjadi capres tahun 2019, di Indonesia tensi politik setiap harinya semakin panas. Sekalipun ada kelompok masyarakat yang memilih tetap diam, namun banyak yang terlibat dalam pertentangan dan konflik yang terjadi antara dua kubu yang bertarung tersebut. Hal ini membuat banyak perdebatan, bahkan konflik muncul di akar rumput dan diantara sesama masyarakat, antara mereka yang

Jerry Indrawan, Anwar Ilmar, Ardli Johan Kusuma:

Rekonsiliasi Politik Pasca Pilpres 2019: Menumbuhkan Semangat Kebangsaan dalam Konstruksi Sosial

mendukung Jokowi dengan yang mendukung Prabowo. Konflik ini terjadi hanya karena ada perbedaan pilihan politik. Sebuah situasi yang merusak jalannya kehidupan demokrasi di negeri ini (Rohiman, 2019).

Teori rekonsiliasi dipilih penulis dalam tulisan ini karena acapkali digunakan untuk proses perdamaian nasional. Rekonsiliasi didefinisikan sebagai upaya untuk mengembangkan sikap saling menerima perdamaian antara individu atau kelompok yang pernah atau saat ini menjadi musuh". Menurut Priscilla Hayner agar proses rekonsiliasi tercipta, sebuah kelompok (negara misalnya) mutlak harus mengetahui dan memahami terlebih dahulu kebenaran yang terjadi di masa lalu (Hayner, 2005).

Proses rekonsiliasi yang ideal menurut Bar-Tal adalah memulai proses rekonsiliasi ketika pihak-pihak yang berkonflik mulai untuk merubah keyakinan, sikap, tujuan, motivasi, dan emosinya terhadap konflik tersebut, dan juga bagaimana hubungan di masa depan antara kedua pihak yang bertikai itu. Agar proses rekonsiliasinya efektif, harus dilakukan secara top down dan bottom up secara bersamaan. Bar-Tal juga mengatakan bahwa kepercayaan akan sebuah tujuan bersama di suatu masyarakat, yang mendasari timbulnya sebuah konflik, harus dirubah. Sekarang, masyarakat harus mampu mengkompromikan tujuan bersama yang berguna bagi semua pihak, yang akan membawa pada hubungan baik antar sesama anggota masyarakat (Bar-Tal, 2009).

Selain itu, perubahan psikologis dari seorang pemimpin sangat mempengaruhi masyarakat yang dipimpinnya. Karena itu, pemimpin menjadi elemen yang sangat penting dalam proses rekonsiliasi karena pemimpinlah yang menginisiasi terjadinya negosiasi untuk mencapai resolusi damai. Pemimpin juga dalam posisi terdepan untuk memimpin proses rekonsiliasi, khususnya apabila diantara mereka memiliki komitmen besar terhadap proses tersebut dan memelihara hubungan baik antar sesama pemimpin. Pemimpin memiliki peran penting untuk memulai dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang terkait upaya rekonsiliasi dan rekonstruksi, agar dipatuhi oleh semua masyarakat yang dipimpinnya (Bar-Tal, 2009).

Secara luas, rekonsiliasi adalah soal "menutup buku" masalah-masalah yang terjadi di masa lalu. Untuk itu, rekonsiliasi harus mampu membuat harmonisasi antara perspektif atau pandangan yang tidak seimbang, serta mampu menerima kebenaran yang bisa jadi menyakitkan. Jika berhasil, setidaknya perbedaan atau konflik yang terjadi masih mampu dipahami dan dimengerti bersama. Rekonsiliasi tidak berarti melupakan kesalahan atau pelanggaran, akan tetapi diselesaikan lewat proses evaluatif. Maka dari itu, tindakan menuduh, lalu membantah, kemudian balas menuduh, yang mengakibatkan adanya perpecahan harus dihentikan (Asmal, et.al, 1996).

Rekonsiliasi memiliki beberapa area cakupan sebagai sebuah disiplin ilmu, khususnya dalam bidang resolusi konflik. Beberapa ahli telah menyusun setidaknya lima kategori rekonsiliasi. Kategori pertama, berdasarkan teori-teori dan model-model, seperti pilihan rasional atau game theory, teori kebutuhan manusia, sosial emosional versus model-model instrumental, dan model pengampunan (Muluk, 2009). Rekonsiliasi memiliki implikasi membangun atau membangun kembali hubungan yang tidak lagi dihantui konflik dan kebencian masa lalu (Hayner, 1999).

Apabila niat rekonsiliasi hendak diwujudkan, maka keempat hal yang disampaikan oleh Ubedillah Badrun berikut dapat menjadi pertimbangan. Pertama, rekonsiliasi wajib mendahulukan kepentingan nasional, bukan kelompok, serta harus dilakukan masing-masing pihak tanpa paksaan apa pun. Kedua, harus ada tokoh bangsa yang tidak terlibat kontestasi politik ini, namun siap menjadi mediator. Ketiga, universitas dapat menjadi mediator proses rekonsiliasi apabila tidak ada tokoh bangsa yang tersedia atau bersedia. Sebab, kalangan akademis diharapkan independensinya terjaga. Kampus yang memiliki rekam jejak dan kredibilitas baik dapat dipercaya untuk melakukan rekonsiliasi. Keempat, rekonsiliasi wajib mewakili kepentingan dari pihak-pihak yang bertikai, sekalipun tetap mengutamakan

kepentingan nasional di atasnya. Rekonsiliasi yang terjadi juga harus mengevaluasi sistem politik yang sedang dijalankan saat ini. Hal ini karena sistem politik Indonesia saat ini menjadi penyebab utama dari konflik, perdebatan, dan ketegangan yang terjadi pasca Pilpres (Rizqa, 2019).

Suka atau tidak kita harus mengakui bahwa pasca Pilpres 2019 konflik antara kubu paslon 01, yaitu Jokowi-Amin, dengan paslon 02, yaitu Prabowo-Sandiaga, yang terjadi secara massif, tidak hanya di antara tim sukses, namun juga pendukungnya (rakyat juga termasuk). Sebuah konflik yang membutuhkan rekonsiliasi politik untuk menyelesaikannya. Untuk itu, sebelum membahas tentang rekonsiliasi politik dan bagaimana menumbuhkan semangat kebangsaan, kita pahami dulu jenis konflik yang terjadi pasca Pilpres tersebut.

Terdapat dua jenis konflik. Pertama, konflik ideologis, yang terwujud dalam bentuk konflik antara sistem nilai yang dianut dan menjadi ideologi dari berbagai kesatuan sosial. Konflik model ini jelas terlihat dalam konflik perbedaan agama, keyakinan, dan suku bangsa. Kedua konflik politis, yang terjadi dalam bentuk pertentangan dalam pembagian status kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi yang terbatas di masyarakat (Nasikun, 2004). Jelas bahwa konflik yang terjadi pasca Pilpres adalah konflik politis, jika kita analisa menurut jenis konflik dari Nasikun di atas. Oleh karenanya, rekonsiliasi yang harus dilakukan adalah rekonsiliasi politik dengan menumbuhkan semangat kebangsaan dalam konstruksi sosial budaya.

Masifnya perbedaan antara kubu 01 versus 02 dalam Pilpres 2019, termasuk sampai kerusuhan atau demonstrasi anarkis yang terjadi 21-21 Mei tahun yang sama, membuat perlunya terjadi rekonsiliasi individual dan rekonsiliasi politik. Para elit politik harus mendorong terjadinya rekonsiliasi pada level tersebut. Konflik atau pertentangan di masa lalu harus ditinggalkan, sekalipun tidak dilupakan. “Perang” bisa saja terjadi, namun dalam konteks negosiasi dan di meja perundingan.

Rekonsiliasi di tingkat politik atau nasional, yang diinisiasi oleh para elit politik, membuat permusuhan di tingkat grassroot atau akar rumput dengan sendirinya berkurang. Rekonsiliasi individu biasanya terjadi ketika pada tataran atas, perdamaian sudah bisa dicapai. Masyarakat akan terus berkonflik jika pemimpinnya tetap melakukannya. Sebuah ajakan untuk berdamai dari elit dapat menyembuhkan luka akibat proses eleksi yang tidak dimenangkan. Rekonsiliasi individu lebih mudah tercapai karena budaya politik Indonesia yang plural dan inklusif membuat proses kembali mengikat semangat kebangsaan relatif cepat.

Sekalipun, memang kehidupan berdemokrasi masyarakat di tingkat bawah juga diuji dari peristiwa Pilpres kemarin, namun penulis berpendapat bahwa konstruksi kebangsaan dan ke-Indonesia-an kita somehow akan menihilkan semua upaya-upaya kebencian antar-sesama anak bangsa. Inklusifisme bangsa kita yang terbiasa dengan perbedaan adalah modal utama rekonsiliasi di tingkat individu. Penulis katakan di awal, demokrasi substansial menekankan pada upaya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi atau golongan, apalagi kelompok tertentu. Suasana kebatinan itu adalah arus sungai yang deras, yang akan mengantarkan bangsa ini pada semangat kebangsaan yang baru.

Selanjutnya, rekonsiliasi di tingkat masyarakat dapat dimulai dari pemerintah yang tidak membatasi kebebasan masyarakat untuk berdemokrasi, khususnya melalui medium siber. Demokrasi deliberatif menggambarkan sebuah ruang diskursus yang terbuka bagi masyarakat, yang menyediakan kesempatan untuk melakukan diskusi tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Diskusi ruang publik tersebut hadir dengan segala macam argumen yang logis dan rasional, untuk kemudian menelurkan sebuah keputusan kolektif. Demokrasi deliberatif dicetuskan oleh Jurgen Habermas yang mendefinisikan demokrasi jenis ini sebagai sebuah manifestasi ruang publik yang memberikan kesempatan

Jerry Indrawan, Anwar Ilmar, Ardli Johan Kusuma:

Rekonsiliasi Politik Pasca Pilpres 2019: Menumbuhkan Semangat Kebangsaan dalam Konstruksi Sosial

bagi publik itu sendiri untuk berpendapat dan memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Demokrasi deliberatif alhasil mampu memberikan kesempatan bagi publik untuk memperkuat demokrasi (Aji & Indrawan, 2019).

Dalam media daring otoritas individu membangun kekuasaan. Otoritas tersebut menjadi arti dari definisi media baru yang isinya tentang kemerdekaan individu mengatur dirinya sendiri. Media baru memiliki premis untuk selalu mempertanyakan otoritas yang lebih tinggi (negara) dan berpikirlah untuk diri sendiri. Sifat individu di media baru ini bisa mewujudkan ruang publik yang demokratis. Otoritas yang sebelumnya ada di tangan media-media tradisional, dan juga dibawah kekangan negara, saat ini ada di tangan para individu yang ada di media baru. Situasi yang membuat media-media daring menjadi harapan bagi pewujudan kedaulatan rakyat dalam proses demokrasi (Aji & Indrawan, 2019).

Pemerintah di negara-negara demokratis harus bekerja berdasarkan parameter kebebasan berbicara untuk membangun daya tahan (resilience) dan penangkalan (deterrence). Membangun sebuah komunitas masyarakat yang sehat digital, yang dapat dengan cepat merespon ancaman terhadap demokrasi siber yang muncul, adalah hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Tidak seperti negara-negara otoriter yang mengandalkan pada solusi top-down, demokrasi memiliki keunggulan untuk melahirkan solusi langsung dari akar rumput untuk menangani masalah demokrasi siber (Aji & Indrawan, 2019).

Menurut Aji & Indrawan (2019), pendidikan politik siber dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau publik untuk menciptakan kontra-narasi yang konstruktif. Kontra-narasi ini contohnya adalah memberikan pembudayaan siber untuk meningkatkan taraf edukasi masyarakat terkait media baru dan juga politik siber. Hoaks dan kampanye negatif adalah masalah utama dalam politik siber, karenanya masyarakat harus melawan dengan menciptakan firewall dari dalam mereka sendiri. Peran masyarakat dalam demokrasi siber akan menjadi maksimal jika mereka sudah tercerdaskan, melalui pendidikan politik siber misalnya. Bagaimanapun, demokrasi bersifat bottom-up. Tidak ada pemerintahan yang demokratis jika rakyatnya tidak demokratis. Jika negara tanggap, dalam hal ini pemerintahan Joko Widodo, maka rekonsiliasi di tingkat masyarakat (individu) dapat berjalan dengan lancar.

Kemudian, menarik juga kita melihat usulan pengamat politik Muhammad Qodari, yang mengusulkan untuk dibuatnya kabinet rekonsiliasi oleh Presiden Jokowi untuk mencegah konflik antar-masyarakat pasca Pilpres. Pos menteri-menteri Jokowi nantinya akan ditempati oleh tokoh-tokoh terbaik dari kedua koalisi yang berkontestasi. Diperlukannya kabinet gabungan jenis ini karena menurut Qodari di beberapa wilayah, seperti Aceh, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan Bali, suara kedua kandidat presiden terpaut sangat jauh di angka 80-90%. Situasi ini membuat polarisasi antar kedua kubu menjadi semakin masif dan juga ekstrem. Polarisasi ini harus dihadapi dengan rekonsiliasi politik secara total agar tidak bereskalasi menjadi konflik horisontal dan vertikal (Jamil, 2019).

Bergabungnya koalisi Prabowo ke kubu Jokowi membuktikan bahwa pendapat Qodari di atas benar adanya. Sejauh ini, Prabowo yang diamanahkan menjabat Menteri Pertahanan mampu menjalankan tugasnya dengan sangat baik, tidak hanya sebagai Menhan, namun juga sebagai figus yang merekatkan kembali dua kubu yang tahun lalu berseteru. Penulis tidak pernah membayangkan bahwa kubu “cebong” dan “kampret” tadi, yang pada pemilu 2019 bersaing seolah-olah dapat membahayakan persatuan negara, sekarang malah bekerja sama untuk bahu-membahu menahkodai kapal besar bernama Indonesia ini. Sebuah rekonsiliasi yang tidak hanya menumbuhkan semangat kebangsaan, tetapi menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia tetap satu, sekalipun banyak sekali perbedaannya.

Konstruksi Sosial dan Budaya

Setelah membahas bagaimana rekonsiliasi politik dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi pasca Pilpres 2019, bagian ini akan membahas bagaimana menumbuhkan

semangat kebangsaan dalam konstruksi sosial budaya. Aspek sosial budaya dibutuhkan karena sekalipun jenis konflik yang terjadi bersifat politis, namun polarisasi yang diakibatkannya menyentuh aspek sosial budaya yang ada di masyarakat (akar rumput). Akar konflik pun adalah permasalahan kepemimpinan, yaitu siapa yang akan menjadi pemimpin rakyat Indonesia.

Atas dasar itu, membahas konstruksi sosial budaya kita tidak bisa menghilangkan aspek kepemimpinan, apalagi rekonsiliasi yang ingin dibangun adalah melibatkan kontestasi di tingkat elit yang terbawa sampai ke akar rumput. Masyarakat hanya akan lestari eksistensinya apabila memiliki nilai bersama. Nilai bersama itu tumbuh melalui interaksi sosial, di mana nilai itu akhirnya mempertautkan antara mereka yang berinteraksi. Seperangkat nilai yang bertautan itulah yang akhirnya mengendap membentuk budaya (Mashad, 2004).

Gaya kepemimpinan suatu masyarakat atau negara pada umumnya merupakan cerminan dari masyarakatnya. Artinya, kepribadian pemimpin merupakan wujud mini dari kepribadian masyarakat yang telah memilihnya menjadi pemimpin. Jarang sebuah masyarakat memilih pemimpin yang berkepribadian antagonis dengan kepribadian mereka. Kepribadian pemimpin hakekatnya terbentuk tidak terlepas dari pengaruh budaya masyarakat di mana dia hidup dan dibesarkan. Sebuah masyarakat dengan kultur yang demokratis akan cenderung melahirkan seorang pemimpin yang demokratis, dan sebaliknya sebuah masyarakat yang didominasi budaya kekerasan dan otoritarianisme, niscaya akan melahirkan pemimpin yang bergaya sama. Logika ini berlaku di mana saja, termasuk dalam konteks Indonesia (Mashad, 2004).

Hubungan antara manusia (sebagai produsen) dan dunia sosial (sebagai produknya), tetap merupakan hubungan yang dialektis. Manusia dan dunia sosialnya berinteraksi satu sama lain, dan produk berbalik memengaruhi produsennya. Eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi merupakan momen dalam suatu proses dialektis yang berlangsung terus-menerus. Mengabaikan satu momentum ini akan menghasilkan terjadinya distorsi dari keseluruhan proses. Tiga momentum dialektik tadi menjadi dasar dari teori konstruksi sosial Berger & Luckmann (Berger & Luckmann, 1990).

Perlu juga dipahami bahwa pada umumnya tipe kepemimpinan yang dikembangkan seseorang biasanya tidak lepas dari pengaruh situasi masyarakat pada saat ia sedang memangku jabatan kepemimpinan. Dalam masyarakat yang sedang mengalami kekacauan, khususnya perseteruan antar-kelompok yang sulit diatasi, bukan mustahil akan membuat resosialisasi gaya kepemimpinan. Kendati ia lahir dan dibesarkan dalam suasana demokratis, termasuk dipilih melalui cara yang demokratis, namun karena situasi kepemimpinannya diwarnai oleh situasi kekacauan, seperti pertentangan antara suku atau agama, maka tidak mustahil si pemimpin yang demokratis akan berubah menjadi otoriter dan bertindak keras guna mengendalikan situasi dan keadaan (Berger & Luckmann, 1990).

Masyarakat Indonesia adalah sebuah masyarakat plural, agamis, kekeluargaan, pencinta damai, gotong royong, dan tentunya inklusif. Budaya ini sudah turun temurun dipraktekkan dalam kehidupan setiap insan bangsa, termasuk mereka-mereka yang akhirnya dipilih menjadi pemimpinnya. Joko Widodo dan Prabowo Subianto adalah insan bangsa yang sejak kecil terekspos dengan budaya demikian di dalam kesehariannya. Konstruksi sosial dan budaya kita berangkat dari “DNA” yang namanya toleransi. Akan sulit bagi penulis untuk memahami bahwa hanya karena kalah pemilu, pihak yang kalah akan menghancurkan negeri ini dengan cara memecah belah rakyatnya.

Rekonsiliasi memang diperlukan, namun rekonsiliasi ini hanyalah karena perbedaan politik, bukan perbedaan semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan kita dipengaruhi oleh

konstruksi sosial budaya yang kuat, yang telah ada berabad-abad lamanya. Tidak mungkin entitas asing yang bernama demokrasi datang lalu menghabisinya perlahan-lahan.

Di saat banyak negara-negara di dunia terpecah karena demokrasi, sebut saja Libia, Republik Afrika Tengah, Sudan, Suriah, Irak, Afghanistan, dll, negara kita tetap kokoh berdiri. Itu karena demokrasi menyerap nilai-nilai sosial dan budaya yang baik yang sudah ada di Indonesia, untuk kemudian dipraktekkan dalam mekanismenya yakni pemilu. Biarlah rekonsiliasi terjadi di level politik saja, yang menurut penulis, politik jauh lebih rendah statusnya dibandingkan level sosial dan budaya bangsa ini. Kontestasi dalam politik wajar terjadi. *Democracy does not turn a blind eye to conflict*. Begitu pula nilai-nilai bangsa ini yang juga penuh dengan perbedaan pendapat, pola pikir, cara pandang, bahkan cara beribadah. Namun, ketika berbicara Indonesia semua itu lenyap. Toleransi mengajarkan bangsa ini untuk mengutamakan kepentingan yang lebih besar dulu, baru kepentingan diri sendiri, sama halnya dengan demokrasi.

Selanjutnya, dalam konteks cyberpolitics kita dapat memaknai bahwa segala bentuk aktifitas masyarakat yang terkait kegiatan politik dalam ruang siber juga memerlukan nilai, norma, peraturan yang merupakan implementasi dari ide dan gagasan yang dapat membentuk budaya dalam konteks kognitif dari masyarakat dalam melakukan aktifitas politik di ruang siber. Apabila dalam kognitif individu-individu dalam masyarakat sudah berkembang nilai, norma, dan budaya yang santun, tidak merendahkan orang lain, tidak melakukan kebohongan publik, tidak menginformasikan sesuatu yang tidak benar (hoaks), maka akan membudaya di masyarakatnya untuk melakukan aktifitas politik di dunia siber dengan santun, jujur, amanah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi yang akan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa (Aji & Indrawan, 2019).

Pergeseran nilai sosial budaya ini juga dapat dimaknai sebagai wujud dari bentuk kebudayaan yang biasa disebut sebagai sistem sosial, yaitu suatu bentuk aktifitas dan tindakan yang berpola dari manusia. Apabila dalam wujud kebudayaan yang pertama tadi lebih mengarah kepada ruang kognitif manusia, dalam wujud kebudayaan yang kedua ini lebih mengarah kepada suatu pola tindakan dan aktifitas manusia. Antara sistem budaya dan sistem sosial saling terkait dan tidak terlepas korelasinya antar yang satu dengan yang lainnya. Kita juga dapat melihat dari contoh, seperti e-learning, e-commerce, dan e-government, dan sebagainya, apabila sudah berkembang dalam masyarakat untuk melakukan aktivitas dengan pola-pola tindakan yang menjunjung tinggi asas demokrasi, hak asasi manusia, integritas, kejujuran maka perilaku-perilaku masyarakat dalam dunia siber akan dilakukan dengan tindakan-tindakan yang benar, yang mematuhi aturan hukum, bukan demokrasi yang “kebablasan” (Aji & Indrawan, 2019).

Pergeseran nilai-nilai sosial budaya dapat juga dimaknai sebagai hasil dari terciptanya benda-benda yang dapat digunakan untuk beraktivitas di dalam ruang siber. Wujud kebudayaan fisik ini dapat menunjang implementasi dari penerapan wujud kebudayaan pertama dan kedua dalam konteks pergeseran nilai-nilai sosial budaya masyarakat dalam ruang siber. Walaupun dimungkinkan juga terdapat pandangan yang sebaliknya dikarenakan situasi dan kondisi yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat. Wujud kebudayaan yang ketiga ini dapat berupa aplikasi, internet, perlengkapan dan peralatan teknologi informasi, dan lain-lain (Aji & Indrawan, 2019).

Sebuah transisi ke perdamaian memiliki arti bahwa konflik terbuka sudah berakhir, namun tidak berarti bahwa semua kekerasan politik atau ancaman kekerasan sudah berakhir. Bila ancaman demikian berlanjut, rekonsiliasi bisa tidak berakar. Rekonsiliasi jarang terjadi dengan segera, bahkan bisa sampai puluhan tahun. Pada akhirnya, rekonsiliasi di tingkat masyarakat akan bergantung pada faktor-faktor dan dinamika-dinamika yang tidak selalu bisa diramalkan atau dikendalikan (Hayner, 2005).

Kontestasi besar antara kubu 01 vs 02 ini memang hampir membuat perseteruan besar, bahkan hampir perpecahan, diantara sesama anak bangsa. Penulis berpendapat medium

siber memiliki dampak yang sangat besar akan hal itu. Akan tetapi, penulis juga optimis bahwa masa depan negeri ini akan cerah, karena bagaimanapun medium siber adalah benda mati. Dibelakangnya tetap ada manusia dengan nilai-nilai sosial dan budaya masing-masing. Banyaknya partisipasi politik melalui medium siber ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak antipati pada politik. Justru, hal ini menunjukkan betapa concern dan pedulinya mereka pada bangsa mereka. Tidak akan ada konstruksi nilai-nilai sosial dan budaya baru yang terbentuk di medium siber, yang ada adalah manifestasi dari penggunaanya.

Oleh karena itu, yang terpenting dalam mengembangkan kultur demokrasi adalah kemampuan pemerintah dalam menyikapi fragmentasi sebagai konsekuensi demokrasi. Ketika fragmentasi masih berada dalam tataran pemerikayaan nilai demokrasi, maka negara tidak perlu mengintervensi. Dapat dibayangkan jika seluruh elemen masyarakat memiliki aspirasi seragam, tentunya negara akan berada pada posisi stagnan. Akan tetapi, jika fragmentasi mengarah pada anarki atau semangat disintegrasi, barulah negara perlu untuk melakukan intervensi. Integrasi dalam kehidupan bernegara akan terwujud jika pemerintah memiliki kemampuan menguasai wilayah yang ada di bawah kekuasaan yuridisnya, termasuk menguasai sikap rakyat, yang digambarkan sebagai loyalitas, kepatuhan, dan kesediaan untuk menempatkan urusan-urusan nasional di atas urusan-urusan lokal atau parokial (Mashad, 2004).

Fragmentasi politik dalam proses demokrasi tidak akan mengganggu integrasi bangsa jika spektrum politik memiliki semangat dan mekanisme yang menjamin terwujudnya integrasi horisontal (antara komponen bersaing), pada saat yang sama integrasi vertikal (antara pemerintah dengan komponen-komponen yang bersaing dalam masyarakat). Melalui semangat dan mekanisme tadi, maka fragmentasi politik dalam demokrasi akan dijalankan dalam semangat tingkah laku integratif untuk mengutamakan kepentingan bersama, bukan kelompok, individu, atau parokial (Mashad, 2004).

Sebenarnya, secara filosofis ideologis, Indonesia telah mempunyai landasan dalam pengaturan kultur kehidupan bermasyarakat melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai makna sangat ideal, yaitu mewujudkan keselerasan antara keragaman dengan kesatuan. Namun, selama ini semboyan tersebut sering diinterpretasikan, bahkan diamalkan secara keliru. Bukannya *unity in diversity*, tetapi *unity from diversity*. Implementasi yang keliru tersebut dijalankan melalui strategi kekerasan dan taktik penindasan. Segala interpretasi Pancasila dan UUD 1945 yang berbeda, apalagi bertentangan, dengan pemikiran dan kebijakan pemerintah langsung dianggap sebagai pengkhianatan dan perlawanan (Mashad, 2004).

Interpretasi keliru tadi akhirnya mengarah pada pengutamaan unsur kesatuan, sehingga cenderung mengorbankan keanekaragaman. Interpretasi itu akhirnya berdampak pada pola pikir penyeragaman. Bhinneka Tunggal Ika harusnya tidak dilihat sebagai penyeragaman, melainkan sebagai perwujudan keselerasan antara keragaman dan kesatuan. Eksistensi keragaman tetap diakui dan dijunjung tinggi, dengan sebuah orientasi yang sama terhadap eksistensi dan cita-cita bangsa Indonesia. Setiap komponen bangsa yang berbeda-beda tadi tetap merasa ikut memiliki negara bangsa dan punya kepentingan yang sama untuk bersatu mewujudkan dan melindungi eksistensi bangsa dari tantangan dan ancaman yang timbul (Mashad, 2004).

Melalui kebijakan pemerintah sekaligus kesadaran elemen-elemen masyarakat tadi, segenap komponen bangsa dengan segala ciri dan aspirasi yang spesifik tetap dapat mengekspresikan diri dalam konteks ke-Indonesia-an. Alhasil, jika nurani internal komponen bangsa merasa sebagai bagian dari Indonesia, apalagi merasa bangga sebagai elemen bangsa Indonesia, niscaya secara otomatis akan menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif bangsa (Mashad, 2004).

Jerry Indrawan, Anwar Ilmar, Ardli Johan Kusuma:

Rekonsiliasi Politik Pasca Pilpres 2019: Menumbuhkan Semangat Kebangsaan dalam Konstruksi Sosial

Terakhir, rekonsiliasi politik menjadi skala prioritas oleh presiden terpilih siapapun pemenangnya. Rekonsiliasi politik pasca Pilpres 2019 dimaksudkan sebagai agenda nasional untuk memulihkan kembali memulihkan hubungan pasca perhelatan Pilpres 2019. baik hubungan antar kontestan, tim sukses, simpatisan termasuk hubungan antar masyarakat. Rekonsiliasi politik harus didasari pada spirit persatuan nasional sebagai wahana untuk menyatukan perbedaan pandangan, ideologi, latar belakang sosial budaya, perbedaan partai politik, dan lain sebagainya. Tanpa adanya spirit ini, maka rekonsiliasi yang dilakukan hanya akan berjalan secara seremonial belaka (Setiobudi, 2019).

Siapa yang harus memulai? Agar rekonsiliasi politik dapat berjalan efektif, maka rekonsiliasi nasional harus dimulai oleh para kontestan Pilpres 2019, yakni pasangan Jokowi-Amien dan Prabowo-Sandi. Keberadaan para kontestan sebagai simbol perjuangan dan pertarungan politik dalam Pilpres 2019 dapat menjadi medan magnet untuk mengerakkan semua tim sukses dan simpatisannya agar dapat melakukan rekonsiliasi politik di semua lini dan semua daerah di Indonesia. Dengan jiwa besar dari kedua pasangan kandidat presiden dan wakil presiden merupakan salah satu kunci sukses utama tercapainya rekonsiliasi politik pasca Pilpres 2019, sehingga keselamatan dan masa depan bangsa menjadi sesuatu yang lebih utama dibandingkan dengan kepentingan kelompok dan golongan (Setiobudi, 2019).

Salah satu nilai karakter bangsa Indonesia adalah semangat kebangsaan, di mana berdasarkan definisi dari Wibowo, semangat kebangsaan dapat diartikan sebagai cara bertindak, berpikir, dan berwawasan yang mendahulukan apa yang menjadi kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Perasaan kebersamaan dari sekelompok atau gabungan individu-individu yang merasa dirinya sebagai satu bangsa juga bisa dikatakan definisi dari semangat kebangsaan. Jadi, semangat kebangsaan menjadi bagian integral dari rasa nasionalisme juga (Wibowo, 2012).

Atas dasar itulah, optimisme penulis muncul bahwa pasca Pilpres kondisi kebangsaan dan ke-Indonesia-an kita justru akan semakin baik. Perselisihan yang terjadi pasca Pilpres 2019 kemarin hanyalah riak-riak kecil yang biasa terjadi dalam demokrasi. Ditambah dengan bersedianya kubu 02 bergabung menjadi bagian dari pemerintah dengan Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Bisa jadi inilah tanda dari Tuhan bahwa semangat kebangsaan kita mulai menuju ke arah demokrasi substansial di mana masyarakat mulai mengerti apa esensi demokrasi, bukan hanya mengerti caranya.

SIMPULAN

Proses rekonsiliasi yang ideal adalah memulai proses rekonsiliasi ketika pihak-pihak yang berkonflik mulai untuk merubah keyakinan, sikap, tujuan, motivasi, dan emosinya terhadap konflik tersebut, dan juga bagaimana hubungan di masa depan antara kedua pihak yang bertikai itu. Rekonsiliasi bertujuan mengembalikan hubungan yang bebas dari kebencian dan konflik yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Agar proses rekonsiliasinya efektif, harus dilakukan secara top down dan bottom up secara bersamaan. Sekarang, masyarakat harus mampu mengkompromikan tujuan bersama yang berguna bagi semua pihak, yang akan membawa pada hubungan baik antara sesama anggota masyarakat.

Suka atau tidak kita harus mengakui bahwa pasca Pilpres 2019 konflik antara kubu paslon 01 dengan 02, yang terjadi secara massif, tidak hanya di antara tim sukses, namun juga pendukungnya, termasuk rakyat. Sebuah konflik yang membutuhkan rekonsiliasi politik untuk menyelesaikannya. Rekonsiliasi harus didasarkan pada kepentingan bangsa dan negara oleh kedua kubu yang bertikai, secara sadar. Oleh karenanya, rekonsiliasi yang harus dilakukan adalah rekonsiliasi politik dengan menumbuhkan semangat kebangsaan dalam konstruksi sosial budaya.

Aspek sosial budaya dibutuhkan karena sekalipun jenis konflik yang terjadi bersifat politis, namun polarisasi yang diakibatkannya menyentuh aspek sosial budaya yang ada di masyarakat. Rekonsiliasi memang diperlukan, namun rekonsiliasi ini hanyalah karena

perbedaan politik, bukan perbedaan semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan kita dipengaruhi oleh konstruksi sosial budaya yang kuat, yang telah ada berabad-abad lamanya.

Niat rekonsiliasi politik ini harus diawali oleh kedua pasangan capres dan cawapres. Kehadiran dan persetujuan mereka melakukan rekonsiliasi adalah magnet bagi pengikut-pengikutnya agar mau melakukan rekonsiliasi politik total dan massal, tidak hanya di Jakarta atau kota-kota besar, tetapi seluruh penjuru Nusantara. Rekonsiliasi juga tidak berlaku pada tingkatan elit saja, tetapi juga sampai level akar rumput, serta seluruh masyarakat Indonesia

Bergabungnya Prabowo dan beberapa partai koalisinya ke dalam pemerintahan menunjukkan keberhasilan proses rekonsiliasi ini. Penunjukannya sebagai Menteri Pertahanan pun memberikan angin segar kepada masyarakat, baik kepada pendukung Prabowo sendiri, maupun kepada seluruh masyarakat, bahwa Jokowi tetap memberikan peran signifikan kepada mantan rivalnya tersebut. Keputusan politik ini adalah bentuk rekonsiliasi politik yang berdampak pada rekonsiliasi sosial dan budaya. Terbukti, saat ini polarisasi sosial dan budaya pasca Pilpres tahun lalu sudah tidak terlihat lagi. Oleh karena itu, semangat kebangsaan dan ke-Indonesia-an kita pasca Pilpres ini adalah menumbuhkan sebuah semangat baru dalam konstruksi sosial budaya bangsa yang mampu semakin menyatukan dan membawa bangsa ini ke masa depan penuh harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, P. M., & Indrawan, J. (2019). *Cyberpolitics: Perspektif Baru Memahami Politik Era Siber*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Asmal, K, et.al. (1996). *Reconciliation Through Truth: A Reckoning of Apartheid's Criminal Governance*. Cape Town: David Philip.
- Bar-Tal, D. (2009). Reconciliation as a Foundation of Culture of Peace, dalam Joseph de Rivera (ed), *Handbook of Building Cultures of Peace*. New York: Springer.
- Berger, P., & Luckmann, T. (1990). *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.
- Hayner, P. B. (1999). *In Pursuit of Justice and Reconciliation: Contribution of Truth Telling*. Washington, DC and Stanford, CA: Woodrow Wilson Center Press and Stanford University Press.
- Hayner, P. B. (2005). *Kebenaran Tak Terbahasakan: Refleksi Pengalaman Komisi-Komisi Kebenaran, Kenyataan, dan Harapan*. Jakarta: Elsam.
- Jamil, A. (2019, Mei 10). *Jaga Persatuan, Pemenang Pilpres 2019 diminta Bentuk Kabinet Rekonsiliasi*. Inews.id. <https://www.inews.id/news/nasional/jk-rekonsiliasi-akan-lebih-mudah-setelah-putusan-mk/566517> (24 Desember 2021).
- Mashad, D. (2004). *Andai Aku Jadi Presiden: Menuju Format Indonesia Baru*. Jakarta: Khalifa.
- Muluk, H. (2009). Memory for Sale: How Groups "Distort" Their Collective Memory for Reconciliation Purposes and Building Peace, dalam Christina J. Montiel & Noraini M. Noor (eds), *Peace Psychology in Asia*. New York: Springer.

Jerry Indrawan, Anwar Ilmar, Ardli Johan Kusuma:

Rekonsiliasi Politik Pasca Pilpres 2019: Menumbuhkan Semangat Kebangsaan dalam Konstruksi Sosial

- Nasikun. (2004). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nawawi, H. (1997). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ri'fan, A. (2018, Mei 21). *Meredam Polarisasi Pilpres 2019*. Detik.com. <https://news.detik.com/kolom/d-4030659/meredam-polarisasi-Pilpres-2019> (24 Desember 2021).
- Rizqa, H. (2019, April 21). *Pengamat Sarankan Empat Poin Rekonsiliasi Pasca-Pilpres*. Republika.com. <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/pqb7wj458/pengamat-jelaskan-empat-poin-rekonsiliasi-pascaPilpres> (28 Desember 2021).
- Rohiman, A. (2019, April 27). *Upaya Rekonsiliasi Pasca Pilpres 2019*. Kompasiana.com. <https://www.kompasiana.com/ahmadrohiman/5cc3ae8795760e6429514a02/upaya-rekonsiliasi-pasca-Pilpres-2019> (3 Januari 2022).
- Setiobudi, E. (2019, April 23). *Menuju Rekonsiliasi Nasional Pasca Pilpres 2019*. Geotimes.co.id. <https://geotimes.co.id/opini/menuju-rekonsiliasi-nasional-pasca-Pilpres-2019/> (3 Januari 2022).
- Sukmadinata. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wessells, M. (2009). Community Reconciliation and Post-Conflict Reconstruction for Peace, dalam Joseph de Rivera (ed). *Handbook of Building Cultures of Peace*. New York: Springer.
- Wibowo, A. (2012). *Pendidikan karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.